

# **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN KETAATAN ATURAN TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe)**

**Sulaiman dan Zulkarnaini**

Program Studi Akuntansi  
STIE Lhokseumawe

## **ABSTRACK**

*This research aims to identify and analyze the effect of internal control and suitability of reward and compliance to accounting rules to the level trends of accounting fraud in the City of Lhokseumawe. Primary data were collected using a survey of civil servants (PNS) that work on the financial section in 3 Units (SKPD) Lhokseumawe Government. The sampling technique used is purposive sampling. Data analysis in this study using multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that the internal control and suitability of reward and compliance to accounting rules partially negative and significant impact on the trend of fraud in the City of Lhokseumawe. Values obtained from this research Adjusted R Square of 0.93, this figure shows that the trend of Accounting fraud in Lhokseumawe Government influenced by internal control and compensation amounted to 27.9%, while 93% is influenced by other factors outside the two independent variables in this research.*

**Keyword :** *internal control and suitability of reward and compliance to accounting rules*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditor dan pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga bermanfaat bagi manajemen untuk pelaksanaan kegiatan operasi sehari-hari. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memberi dasar bagi manajemen untuk membuat perencanaan. Sugiono dan

Untung (2008:3). Dengan demikian, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan sangat penting bagi investor dan manajemen sehingga harus dapat diandalkan.

Mengingat pentingnya laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disusun sebaik mungkin dengan data yang akurat sesuai aturan akuntansi yang berlaku. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja serta perubahan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Karena itu manajemen sangat berperan terhadap hasil akhir dari laporan keuangan, mengingat peran dan otoritas yang besar yang dimiliki manajemen maka besar kemungkinan terjadinya berbagai macam perilaku kecurangan. Tindakan kecurangan pada laporan keuangan membuat informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Tindakan kecurangan dalam laporan keuangan ini merupakan salah satu tindakan kecurangan akuntansi. Tuanakota (2013: 38).

Kecurangan merupakan suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, kepada pihak lain yang dilakukan baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur dan merugikan pihak lain. Karyono (2013:4). Umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (Wilopo, 2006: 20). Salah satunya dapat kita lihat dalam kasus tersebut antara lain kasus bobolnya kasbon Pemerintah Aceh Timur Tahun 2005-2006 yang melibatkan mantan Bupati Aceh Timur Periode 2000 – 2005, dimana negara dirugikan sebesar 88 miliar. Harian Serambi Indonesia, 19

Februari 2016. Kasus lainnya adalah korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2011, dimana Negara dirugikan sebesar 3,5 miliar. Harian Serambi Indonesia, 8 September 2014. dan yang terbaru adalah kasus korupsi dana Hibah Pemerintah Aceh untuk Yayasan Cakradonya (Cakdon) Lhokseumawe tahun 2010, dimana kerugian Negara diperkirakan mencapai 1 miliar. Harian Serambi Indonesia, 16 Mei 2016.

Banyaknya kasus kecurangan salah satunya dipengaruhi oleh adanya tidaknya peluang melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik. Tunggal, (2011:3). Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001). Mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai. Oleh karena itu pengendalian internal memegang peranan penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya berbagai tindakan kecurangan salah satunya adalah kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi juga didorong oleh tindakan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Salah satunya adalah adanya ketidakpuasan individu atas kompensasi yang diperoleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Nawawi (2001: 315). Kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang

diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Panggabean (2002: 20). Dengan kompensasi yang sesuai, perilaku kecurangan akuntansi dapat dikurangi. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan kecurangan dalam akuntansi dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecurangan adalah ketaatan terhadap aturan. Wilopo (2006 : 40). Aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen dalam melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan. Adelin dan Fauzihardani (2013:15). Untuk itu dibutuhkan suatu aturan dan regulasi yang ketat agar tindakan kecurangan akuntansi dapat diminimalisir dan memberikan keyakinan bahwa aturan tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Smet (1994) dalam Jamilah (2007: 15). ketaatan adalah tingkat seseorang melaksanakan suatu cara atau berperilaku sesuai dengan apa yang disarankan atau dibebankan kepadanya. Aturan yang ketat dan sanksi yang tegas mutlak diperlukan agar sikap dan perilaku kecurangan dapat diminimalisir.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan diantaranya oleh Pristiyanti (2012) yang melihat persepsi pegawai instansi pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, keadilan

distributif, keadilan prosedural, budaya etis, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan.

Lebih lanjut Zulkarnain (2013) melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang memengaruhi terjadinya fraud pada dinas Kota Surakarta. Dalam penelitian tersebut Zulkarnain menggunakan variabel kecurangan akuntansi di sektor publik, keefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, dan penegakan hukum. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif keefektifan sistem pengendalian internal, kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, dan sistem pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

Penelitian lain juga dilakukan Tiro (2014) yang meneliti pengaruh pengendalian internal dan kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan pada Pemerintah Kota Palopo. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pengendalian internal dan kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan akuntansi di sektor publik.

Mengacu pada penelitian Pristiyanti (2012) Zulkarnain (2013) dan Tiro (2014), penelitian ini akan membahas tentang pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah Kota Lhokseumawe. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian dan objek penelitian

yang dilakukan. Penelitian ini memilih keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan sebagai variabel bebas. dan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai objek penelitian, dengan alasan munculnya berbagai fenomena kasus korupsi di Kota Lhokseumawe dan Pemerintah kota Lhokseumawe juga akan melaksanakan pilkada sehingga potensi terjadinya kecurangan akuntansi sangat besar.

Dengan pertimbangan tersebut maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan variabel yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi khususnya di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengendalian Internal, kesesuaian Kompensasi dan ketaatan aturan Terhadap Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe".

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Kecurangan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2001) kecurangan akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut:

" (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat

laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ".

Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Dari perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) Sutherland (1940). Sebagaimana dikutip oleh Geis dan Meier (1977) dalam Wilopo (2006: 33), menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.. IAI tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kecurangan akuntansi merupakan kejahatan. Sebaliknya Sutherland (1940) dalam Wilopo (2005) sebagai pakar hukum menganggap kecurangan akuntansi sebagai kejahatan.

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori *GONE*, Tuanakota (2013: 47) yaitu:

1. *Greed* (Keserakahan).

2. *Opportunity* (Kesempatan)
3. *Need* (Kebutuhan)
4. *Exposure* (Pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Faktor kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Tuanakota (2013: 57). Secara umum pada instansi pemerintah pembuat kebijakan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada pegawai lainnya. Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

Berdasarkan jenis kecurangan dan bentuknya Kecurangan dapat dikelompok menjadi beberapa bagian yaitu :

#### 1. Korupsi (*Corruption*)

##### a. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Sebuah konflik kepentingan terjadi ketika seseorang atau organisasi bertindak atas nama pribadi atau organisasi lain, dan

memiliki kepentingan diri dalam kegiatan yang dilakukan, tanpa diketahui oleh individu atau organisasi yang diwakili. Konflik kepentingan bisa muncul dengan sendirinya, atau dapat menjadi bagian rumit dari penipuan lain seperti suap dan *gratifikasi* ilegal.

##### b. Penyuapan (*Bribery*)

Suap (*Bribe*) adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Menurut Hall (2007 : 286) definisi *bribery* yaitu : "Penyuapan (*bribery*) melibatkan pemberian, penawaran, permohonan untuk menerima, atau penerimaan berbagai hal yang bernilai untuk mempengaruhi seorang pejabat dalam melakukan kewajiban sah nya".

##### c. Gratifikasi (*Illegal Gratifications*)

Menurut Hall (2007 : 286) Gratifikasi (*Illegal Gratifications*) dapat didefinisikan sebagai berikut : " tanda terima kasih yang tidak sah (*illegal gratifications*) melibatkan pemberian, penerimaan, penawaran atau permohonan untuk menerima sesuatu yang bernilai karena telah melakukan tindakan yang resmi".

Sesuatu nilai (berupa barang atau uang) bahwa seseorang memberi, menawarkan atau berjanji untuk, atau karena, sebuah tindakan resmi yang

akan dilakukan oleh penerima bahwa orang tersebut tidak memiliki hak atas nilai tersebut, skema ini hampir sama dengan penyuapan, tetapi transaksinya setelah tindakan resmi tersebut dilakukan.

d. Pemerasan ekonomi (Economic Extortion)

Menurut Hall (2007: 287) definisi pemerasan ekonomi (*economic extortion*) yaitu : "pemerasan secara penggunaan (atau ancaman untuk melakukan) tekanan (termasuk sanksi ekonomi) terhadap seseorang atau perusahaan, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga"

Pada dasarnya, pemerasan ekonomi (*Economic Extortion*) adalah kebalikan dari penipuan penyuapan. bukan vendor yang menawarkan suap, tapi karyawan yang dituntut untuk memberikan bayaran kepada vendor untuk menguntungkan vendor. Biasanya diinduksi karyawan tersebut terancam atau takut.

2. Pencurian asset (Asset Misappropriation)

Pencurian asset meliputi penyalahgunaan/pencurian asset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*). Cabang-cabang dari penggelapan ini adalah :

a. Kas (*Cash*)

Yang menjadi sasaran penjarahan adalah uang kas maupun di bank yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pelakunya. *Asset Misappropriation* dalam bentuk penjarahan kas terbagi menjadi tiga yaitu :

b. *Skimming*

Dalam *skimming* uang diajarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam kecurangan yang sangat dikenal auditor, yakni *Lapping*.

c. *Larceny*

*Larceny* adalah tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang sebenarnya tidak memiliki otoritas atas fungsi yang dicurangnya. Bologna (1994) membedakan *larceny* dengan *embezzlement*, yaitu jika *larceny* dilakukan oleh orang yang sesungguhnya tidak memiliki otoritas atas fungsi tertentu sedangkan *embezzlement* dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas atas fungsi tersebut. Contoh tindak *larceny* antara lain: pengeluaran uang kas tanpa ijin pemilik otoritas; pembuatan cek kosong; pembuatan pembukuan ganda oleh pemegang kas; penundaan pembukuan pos penerimaan; dan lain-lain.

d. *Fraudeulent disbursment*

Jika penggelapan dilakukan pada saat arus uang sudah teredam dalam sistem maka penggelapan ini disebut *Fraudeulent disbursment*. Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah ini sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian.

e. *Inventory and all other asset*

Asset lainnya juga bias menjadi sasaran adalah aktiva tetap. Modus operasi ini dalam penjarahan asset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah *missue* dan *larceny*. *Missue* adalah penyalahgunaan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika apa yang disalahgunakan tersebut tidak dikembalikan maka dikatakan *larceny*.

### 3. Fraudulent Financial Statement Schemes

Banyak investor yang mengandalkan laporan keuangan perusahaan publik, namun kenyataannya fakta-fakta telah dimanipulasi. Jenis kecurangan ini sangat dikenal para auditor yang melakukan *general audit*. *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

## 2. Pencegahan Kecurangan

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Menurut Prasetyo (2011). Pada dasarnya kecurangan sering

terjadi pada suatu suatu entitas apabila:

- a. Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
- d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- f. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

## 3. Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Sidik et al, (2002) dalam Maimunah, (2006). Sedangkan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

### **1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)**

Lingkungan Pengendalian dalam SPIP merupakan unsur dasar/fondasi bagi pembentukan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu fondasi dalam membangun SPIP harus kuat agar dapat menopang dan mendukung unsur-unsur lainnya sehingga apa yang diharapkan SPIP dapat terwujud. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika.
- b. komitmen terhadap kompetensi.
- c. kepemimpinan yang kondusif.
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia/
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

### **2) Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)**

Penilaian Resiko dalam system pengendalian internal adalah usaha pemerintah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yaitu dengan cara mengidentifikasi serta melakukan analisis resiko. Identifikasi resiko dilaksanakan dengan penggunaan metodologi yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara menyeluruh menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Analisis Resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan Instansi Pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

### 3) Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian setidaknya memiliki karakteristik; pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, dikaitkan dengan proses penilaian resiko, disesuaikan dengan karakteristik instansi pemerintah tersebut, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dijalankan, serta adanya evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian.

### 4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).

Informasi dan komunikasi dalam SPIP adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.

### 5) Pemantauan Pengendalian Intern. (*Monitoring*).

Pemantauan pelaksanaan SPIP secara periodik (berkelanjutan) harus dipantau. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja pengendalian intern untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan. Pemantauan secara periodik diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Komponen pertama, lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup

- a. Integritas dan nilai etika (*integrity and ethical values*).
- b. Komitmen terhadap kompetensi (*commitment to competence*).
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit (*Board of Directors or Audit Committee participation*).
- d. *Committee participation*.
- e. Filosofi dan gaya operasi manajemen (*management's philosophy and operating style*).
- f. Struktur organisasi (*organizational structure*).
- g. Pemberian otoritas dan tanggung jawab (*assignment of authority and responsibility*).
- h. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (*human resource policies and practices*).

Komponen kedua penaksiran risiko dalam sistem pengendalian internal adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Komponen ketiga, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

Komponen keempat informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam *posting* dan mengikhtisarkan.

Komponen kelima pemantauan kegiatan pengendalian internal secara periodik harus dipantau oleh manajemen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan.

### C. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode data kuantitatif adalah metode analisis data dengan menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Penggunaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini karena variabel independent (X) dalam penelitian ini lebih dari satu yaitu tiga variabel. Analisis ini bermanfaat untuk memprediksi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yang telah ditetapkan. Bentuk formula dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

- Y = Kecurangan akuntansi
- X1 = Pengendalian internal
- X2 = Kesesuaian kompensasi
- X3 = Ketaatan aturan
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2$  = Koefisien beta regresi
- $\epsilon$  = Error yerm

### D. Pembahasan

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum,

dan efektivitas dan efisiensi operasi (Tunggal, 2011:3). Sistem pengendalian internal yang rendah dan kepatuhan karyawan terhadap pengendalian internal yang juga rendah dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan (*Fraud*) di sektor pemerintahan. Hasil uji penelitian variable pengendalian internal secara parsial pada Pemerintah Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh negative terhadap terjadinya kecurangan akuntansi. hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis yang memiliki nilai probabilitasnya yaitu 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. nilai  $t_{hitung}$  (7.049) >  $t_{tabel}$  (20.003). hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan akuntansi.

Pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen cenderung melakukan tindakan menyimpang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Kecenderungan kecurangan dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik.

Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.. penelitian ini sesuai dengan openelitian yang dilakukan Wilopo (2006), Pristiyanti (2012), Najahningrum (2013), Adelin dan Fauzihardani (2013)

yang melihat pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal maka semakin kecil kecenderungan terjadinya kecurangan

Kompensasi adalah Penghargaan atau ganjaran kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja" (Nawawi, 2001:315). Seseorang cenderung akan melakukan suatu hal untuk mendapatkan kompensasi. Jika kompensasi diberikan kepada manajemen, maka manajemen cenderung bertindak sesuai keinginan instansi dan menghindari tindakan menyimpang agar tetap mendapatkan kompensasi. Hasil uji penelitian yang dilakukan pada pemerintah kota Lhokseumawe membuktikan bahwa keesesuaian kompensasi memiliki pengaruh secara parsial terhadap kecurangan akuntansi, hal ini dapat dilihat pada hasil hipotesis dimana dari nilai probabilitasnya yaitu 0,005, yang lebih lebih kecil dari 0,05. nilai  $t_{hitung}$  (7.049) > (20.003). hal ini membuktikan adanya pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap terjadinya kecurangan akuntansi.

Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap tindakan maupun perilaku seseorang dalam sebuah instansi. Bagi karyawan kesesuaian kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi instansi atau pemerintah kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan kinerja. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan

yang baik dalam pemberian kompensasi.

Kecurangan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut tidak lain didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau pemerintah termasuk melakukan kecurangan akuntansi.

Kompensasi yang sesuai diharapkan mampu mengurangi adanya keinginan untuk melakukan tindak kecurangan. Kompensasi yang sesuai dapat mengurangi tekanan untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.. penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Thoyibatun (2009), dan Zulkarnain (2013) yang melihat pengaruh kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian kompensasi maka semakin kecil kecenderungan terjadinya kecurangan.

Pada teori perkembangan moral Kohlberg (1969), moralitas manajemen yang tinggi juga didukung pada ketaatan aturan yang berlaku. Dalam teori tersebut pada tahap pasca konvensional, manajemen berorientasi pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen Kusumastuti (2012). Berdasarkan uji

penelitian secara parsial menunjukkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya kecurangan akuntansi di Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe hal ini dapat dilihat dari hasil uji penelitian dimana nilai probabilitasnya yaitu 0,001, lebih kecil dari 0,05. nilai  $t_{hitung} (7.049) > t_{tabel} (20.003)$ . artinya, ketaatan terhadap aturan berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pristiany (2012) Wilopo (2006) dan Thoyibatun (2009) yang juga menunjukkan bahwa ketaatan terhadap aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Ketaatan aturan mampu mempengaruhi perilaku pegawai dalam bertindak dan bertingkah laku dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Adanya sanksi yang tegas terhadap para pelanggar aturan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe ikut menjadi pertimbangan dalam melakukan kecurangan. tanpa adanya sikap taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka para pembuat kebijakan akan mudah memanipulasi terhadap berbagai macam transaksi keuangan, hal ini akan memicu munculnya kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil uji penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe membuktikan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan terhadap aturan memiliki pengaruh secara simultan terhadap terjadinya kecurangan pada Pemerintah kota Lhokseumawe, hal ini dibuktikan

dengan hasil penelitian dimana diketahui bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $250.027 > 2,77$  dan nilai probabilitasnya ( $<0,001$ )  $< 0,05$ . Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wilopo (2006). Zulkarnain (2013) dan Tiro (2014) dimana dalam penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap terjadinya kecurangan akuntansi.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan terhadap kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil uji variabel pengendalian internal menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  (7.409) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2.003), dengan tingkat kekeliruan 5% maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe namun tidak signifikan.
2. Hasil uji variabel kesesuaian kompensasi menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  (2.044) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2.003), dengan tingkat kekeliruan 5% maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Hasil uji variabel ketaatan aturan menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  (9.107) lebih besar daripada  $t_{tabel}$

(2.003), dengan tingkat kekeliruan 5% maka dapat disimpulkan bahwa ketaatan aturan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

4. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai  $f_{hitung}$  (250.027) lebih besar dari  $f_{tabel}$  (2.77) maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Adapun kontribusi variabel pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan sebesar 93% terhadap kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe

## F. Daftar Pustaka

- Wilopo (2006). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, simposium Akuntansi XII, STIE Perbanas.
- Adelin, V. dan Fauzihardani, E. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis. WRA, Vol. 1, No. 2.
- Aranta (2013). Pengaruh Moralitas Aparat Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota

- Sawahlunto). *ejournal.unp.ac.id*, diakses 18 Feb 2016).
- Hall, J.A. (2011). *Principles of Accounting Information systems.*, Asia Edition. Cengage Learning.
- Fauwzi, M.G. (2011). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handoko, T.H. (2001). Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, Ed. 2. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan dan Malayu, S.P. (2002). Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik, Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi. (2002). Auditing. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Nawawi. (2001). MSDM Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. 2006. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Pristiyanti, I.R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysys Journal AAJ1(1)(2012)*
- Rivai, V. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekaran. (2009). *Research Methods For Business* (Metodologi Penelitian untuk Bisnis). Jakarta: Salemba 4.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tuanakotta, M.T (2012). Akuntansi Forensik dan Audit investigative Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, S (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, (2011), Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Simanjuntak.P.J (2008). Manajemen dan Evaluasi kinerja, Jakarta; Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Baswir, R. (1999). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Dwiyanto,A. (2002), Reformasi Birokrasi di Indonesia, PSKK-UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sulaiman dan Zulkarnaini

- Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE. Harian Serambi Indonesia, 08 September 2014
- Zulkarnain 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. \_\_\_\_\_, 18 Februari 2016  
\_\_\_\_\_, 16 Mei 2016  
Accounting Analysys Journal AAJ1(3)(2013)